

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Adapun kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Rata-rata indeks tingkat pengungkapan informasi keuangan terbukti lebih rendah daripada rata-rata indeks non keuangan. Hal ini membuktikan bahwa banyak Pemerintah Kota/Kabupaten yang masih tidak optimal dalam mengembangkan *website*-nya dan menerapkan UU KIP, mereka hanya sekedar memenuhi kewajiban mempunyai *website* seperti yang telah diatur dalam UU tanpa serius mengelolanya. Di sisi lain, Pemerintah Kota/Kabupaten masih memilih-milih informasi yang ingin diungkapkan yaitu informasi yang dianggap ‘aman’ yaitu informasi yang tergolong non keuangan.
2. Rata-rata fitur keuangan yang sering terdapat pada *website* Pemerintah Kota/Kabupaten di Indonesia adalah secara berturut-turut yakni Peraturan Keuangan Daerah (6,7), LRA/APBD (6,1), RPJMD (4,9), Renstra (2,8), Inventarisasi Aset (1,3), Neraca (0,8), Lakip (0,7), Arus kas (0,3) dan CALK (0,1) dan rata-rata fitur non keuangan yang sering muncul pada *website*

Kota/Kabupaten di Indonesia secara berturut-turut adalah Berita (25,8), Visi

Bagus Husen Prawira Muhammad, 2012

Analisis Tingkat Pengungkapan Informasi Keuangan Dan Non Keuangan Dalam Perspektif E-Government Pada Website Pemerintah Kota/Kabupaten Di Indonesia

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

dan Misi (22,3), Sejarah (22,3), Kontak (21,8), Fasilitas Pencarian (19,4), Tautan Link (17,9), Peta (17,6), Dokumen Peraturan Daerah (16,7), Informasi Legislatif (16,2), Promosi (15,4), Tanya Jawab (13,3), *E-Procurement* (13,0), Poling (11,7) Forum(10,1) dan Sturktur (9,8).

3. Peringkat pengungkapan informasi keuangan pada *website* Kota/Kabupaten di Indonesia yang termasuk kedalam tiga besar diperoleh oleh Kota Cimahi (77,8), Kab. Blitar (55,6) dan Kab. Solok (44,4) sedangkan peringkat pengungkapan informasi non keuangan pada *website* Kota/Kabupaten di Indonesia yang masuk kedalam tiga besar adalah Kota Denpasar (100,0), Kota Batu (100,0) dan Kab. Sumenep (100,0). Serta hubungan peringkat informasi keuangan dengan klasifikasi Kota/Kabupaten tidak memiliki hubungan yang menggambarkan bahwa, klasifikasi Kota/Kabupaten menurut besarnya belum bisa menunjukkan lebih transparan dan akuntabilitas dalam pengungkapan informasi keuangan tetapi berbeda dengan pengungkapan informasi non keuangan dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan klasifikasi Kota/Kabupaten dengan pengungkapan informasi non keuangan yang menunjukkan bahwa Kota/Kabupaten telah mengembangkan *website* sesuai dengan Buku Panduan *Website* Pemerintah Daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat mengajukan saran sebagai berikut :

1. Bagi pihak Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Indonesia untuk mengembangkan *website* resminya terutama dalam informasi keuangan agar terciptanya akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan kinerja pemerintah tersebut serta mendorong program *e-Government* sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* dan mendukung UU Nomor 14 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Bagi Pengguna Informasi atas Pemerintah daerah tersebut untuk memberikan masukan kepada pemerintah atas kebijakan pemerintah dalam penyampaian informasi kepada masyarakat terutama informasi yang dibutuhkan oleh penggunanya.
3. Untuk penelitian ini ke depan, diharapkan dapat dilanjutkan dengan memasukkan faktor-faktor lain yang berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap variabel-variabel yang sudah diteliti, seperti APBD, umur Kota/Kabupaten, luas wilayah dan penelitian selanjutnya untuk periode pengamatannya ditentukan dalam beberapa waktu untuk memperoleh data yang terbaru. Serta memasukkan aspek pengembangan *website* yang berkelanjutan dan kontinu dalam pemberian nilai akhir indeks tingkat pengungkapannya.